

## Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan

Arlis Prayugo<sup>1</sup>, Rahadi Budi Prayitno<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; arlisyugo@yahoo.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; rdipuro@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Political Education;  
Political learning;  
Political awareness

#### Article history:

Received 2022-05-02

Revised 2022-07-04

Accepted 2022-09-17

---

### ABSTRACT

The pursuit of political education for the general public and for educated people is to function in order to raise their awareness to be actively involved in controlling, evaluating, and increasing active participation in governance and the implementation of its policies. Political education is a continuous process, through political education that must be maintained is in shaping awareness in the role of human beings and the role of citizenship. This human role enables the development of talents and abilities of each individual, in carrying out his political functions in accordance with the status and mission of life that each individual has. While the role of citizenship invites the public to take an active role through participation in the process of thinking, dialogue and political action in order to achieve progress and improvement by realizing the role of their obligations and political rights.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

Arlis Prayugo

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; arlisyugo@yahoo.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena relawan yang muncul belakangan dalam kancah perpolitikan Indonesia adalah merupakan hal baru. Dimana pada sebelumnya relawan lebih banyak dikenal dalam hal-hal fenomena kemanusiaan. Pada masa lalu tersebut kata relawan mungkin lebih tepat digunakan sebagai simpatisan, penggembira serta pendukung partai politik tertentu. Relawan dalam hal ini mengacu kepada masyarakat umum yang tidak terafiliasi dengan tegas pada salah satu kelompok partai tertentu akan tetapi tergerak untuk mendukung partai atau calon pemimpin mereka (presiden, gubernur, walikota, bupati dan sebagainya) yang dipandang bisa menyesuaikan aspirasi mereka atau di pandang sejalan dan sesuai dengan cita-cita mereka sebagai masyarakat. Lahirnya relawan dalam hal ini juga bisa kita lihat sebagai suatu bentuk menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada partai politik. Sehingga membuat orang-orang memilih berkumpul dalam kelompok pertemanan sejenis, perkumpulan hobi, kumpulan komunitas, dalam rangka mengakomodir pilihan politik mereka ketimbang menyerahkan kepada partai yang menurut mereka kurang jelas arah suara mereka.

Tradisi *volunteristik* ini merupakan bagian dari kolektivitas dalam bentuk *power to* dan *power with* yang telah melahirkan semacam ledakan kegembiraan dan kreatifitas dalam militansi dukungan

yang cukup mencengangkan. Hal ini juga merupakan upaya derivative melahirkan demokrasi yang terikat kuat pada tingkat kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*) sebagai afiks. Mereka tumbuh kolektif yang bergerak bersama dalam sifat yang politis. Mereka dikatakan politis karena peran users dan chooser di luar kaidah kontrol yang selama ini dimonopoli perspektif elit (Agus Hernawan dalam Samah & S, 2014).

Fenomena partisipasi Volunter dalam pemilu beberapa waktu lalu tersebut harus dimaknai secara bijaksana oleh partai politik. Selain tumbuhnya kesadaran politik warga yang otonom dan mandiri sebagai sesuatu hal yang positif, masyarakat dilihat mampu mengorganisir diri mereka sendiri melalui wadah perkumpulan, komunitas, dalam usaha mengkomodasikan pilihan dan preferensi politik mereka. Namun dipihak partai politik, kecenderungan ini harus ditangkap secara cerdas, baik sebagai "*early warning*" atau sebuah peringatan dini bagi partai untuk memperbaiki kinerja, interospeksi kelembagaan, eksistensi keberadaan, sehingga partai politik keberadaannya masih bisa diharapkan oleh masyarakat kita.

Namun bagaimanapun juga tingkat kesadaran politik yang meningkat tanpa dibarengi oleh pelembagaan organisasi politik yang baik maka akan membawa dampak kurang sehatnya mekanisme demokrasi di sebuah negara. Karena demokrasi mensyaratkan berjalannya infrastruktur politik yang sehat didalamnya yang pada hakikatnya dimiliki oleh partai politik, sebagai sarana artikulasi dan penyalur aspirasi (*agregasi*) kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting membangun sebuah partisipasi politik yang berlandaskan pada kesadaran diri manusia sebagai insan politik dan warga negara dalam menjalankan peran-peran politiknya. Hal ini mesti dilakukan melalui proses pendidikan politik secara berkelanjutan. Pendidikan politik mesti dimaknai sebagai proses belajar seseorang warga negara dalam rangka menumbuhkan kesadaran atas peran dan statusnya sebagai warga negara.

Pendidikan adalah suatu upaya mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus kearah pembinaan manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan ideologi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan harus dilakukan secara terus menerus, karena pendidikan bukanlah proses yang terjadi disekolah dan kampus saja, namun juga diluar sekolah dan kampus, yakni dilingkungan pekerjaan dan pemukiman termasuk didalamnya pada lingkungan keluarga. Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Sehingga tujuan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkung masyarakat dan negara dimana mereka berada. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan politik mereka terbangun kesadaran akan status dan perannya masing-masing dalam kehidupan bernegara serta memaksimalkan peran kewarganegaraannya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan sebagai sumber primer, disertai pengamatan terhadap organisasi pelaku pendidikan politik (Partai, Kelompok kepentingan, dan beberapa stakeholder). Dan disertai literatur kepustakaan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Setelah data tersebut dikumpulkan dan didapatkan maka penulis mengolah, menganalisa, dan melakukan interpretasi data, sehingga menghasilkan gambaran penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Huntington & Nelson, 1994 menyebutkan, bahwa sebuah partisipasi yang berskala luas serta dibarengi dengan derajat yang rendah atas pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik

anomik dan kekerasan. Sebaliknya betapapun derajat partisipasi yang rendah akan juga cenderung untuk memperlemah kelembagaan partai politik serta juga pranata-pranata politik yang lain dan sejumlah kekuatan sosial. Adalah kemudian menjadi kepentingan pimpinan partai politik untuk memperluas basis peran serta politik sejauh mereka mampu mengorganisasikan partisipasi itu di dalam bentuk kerja struktur partai. Partisipasi tanpa organisasi akan merosot menjadi gerakan massal, sementara organisasi yang tidak melahirkan partisipasi cenderung mengarah pada klik personal. Maka partai yang kuat membutuhkan derajat pelembagaan politik dan dukungan massa yang cukup tinggi (Huntington, 2006).

Munculnya partisipasi politik dalam hal relawan dalam sebuah masyarakat digital ini juga semakin efektif dan massif di dukung oleh kemudahan teknologi informasi melalui media sosial serta kecanggihan *smartphone*. Bahkan perkembangan media sosial jenis ini bisa memberikan informasi secara *realtime* bisa terupdate dan terakses secara luas ke pelosok negeri. Media sosial yang kini menjadi salah satu 'mesin politik' efektif untuk melakukan propaganda politik maupun penetrasi isu adalah dunia yang sangat akrab dengan generasi masyarakat milenial. Di titik inilah, karena tipikal mereka sebagai generasi digital native, yang sangat melek informasi dan kerap bercengkrama dengan *smartphone* dan media sosial, menjadikan generasi masyarakat milenial sejatinya tidak hanya strategis secara kuantitas, tetapi juga amat penting sebagai salah satu 'mesin' propaganda isu politik dalam memobilisasi dukungan suara elektoral (Mujtahid, 2013).

Namun bentuk partisipasi politik yang demikian signifikan tersebut akan cepat sekali menemui titik jenuhnya dan berubah cukup drastis terhadap dukungan di dalam proses politik, karena menganggap dinamika politik itu tidak menarik dan jauh dari keseharian kehidupan realita mereka. Adakalanya juga mereka cepat merespon paparan dari berita-berita politik yang mereka sikapi dalam bentuk yang beragam mulai dari sebagai komentator, *like*, dan hanya sebatas pengamat. Ditambah kondisi sosial, politik, dan perekonomian yang tidak serta merta membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Dan sangat disayangkan kalau bentuk partisipasi ini terpengaruh oleh nilai-nilai politik yang kurang baik dari lingkungan dan media sosialnya. Maka justru yang tadinya bentuk partisipasi politik ini dipandang sebagai sesuatu yang positif, malah pada akhirnya kontraproduktif dengan tujuan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang hendak dicapai.

Hal tersebut senada dengan apa yang pernah diutarakan oleh (Huntington & Nelson, 1994) bahwa partisipasi yang teramat luas tanpa disertai dengan pelembagaan politik yang kuat akan menimbulkan semacam politik yang anomik dan menimbulkan kekerasan. Hal ini bisa kita lihat dari mana banyak muncul berita-berita *Hoax* yang memunculkan perlawanan dari kubu pihak lawan politik terhadap kubu lawan politik lainnya. Mereka memproduksi berita, data, dan fakta yang dimanipulasi. Lagi-lagi dalam hal ini sangat berdampak negatif kepada masyarakat pengguna media sosial, terlebih bagi mereka yang secara umum tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup baik dalam kehidupannya.

Untuk itu, menjadi tantangan besar bagi stakeholder perangkat sistem politik dalam hal ini Partai Politik dan Penyelenggara PEMILU yakni KPU dan pemerintah sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada para masyarakat luas pada umumnya dengan pendidikan politik yang menumbuhkan kesadaran akan pemahaman peran diri sebagai insan dan sebagai warga negara. Karena masyarakat kita inilah yang akan menentukan arah pembangunan dan proses politik yang berkemajuan dimasa mendatang melalui partisipasi politiknya. Jadi keberadaan masyarakat sipil bukan sekadar menjadi pertarungan kemenangan pemilu bagi sebuah partai peserta pemilu semata tetapi jauh lebih signifikan dari itu adalah bagaimana keberadaan mereka menjadi modalitas untuk pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik dalam sebuah mekanisme sistem politik dan pemerintahan.

## Pendidikan Politik dan Peranan Insani

Fungsi dan tujuan pendidikan melalui pengajaran di Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2003 adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut (Kartono & Kartini, 2009), analogi dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut diatas, maka tujuan pendidikan politik di Indonesia ialah : menampilkan peranan insani/humani setiap individu yang unik selaku warga negara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin, serta agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. Peranan pendidikan politik bagi diri insani ini diharapkan akan membangkitkan kesadaran, daya dorong, motivasi diri (*self motivation*) perkembangan minat dan bakat setiap individu untuk bisa melaksanakan fungsi politiknya sebagaimana warga negara (*Citizen*) dalam menjalankan status, peran dan misi hidupnya.

Aktivitas diri dalam peranan fungsi politik ini akan mampu melahirkan aktivitas yang terlembagakan. Baik itu lembaga-lembaga yang bersifat mengartikulasikan suara kehendak publik dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan ataupun penguatan infrastruktur politik dalam bentuk organisasi politik partai yang lebih efektif mengakomodir keterwakilan rakyat sebagai pemberi suara melalui Pemilihan umum. Melalui konsep keterwakilan inilah sejatinya peran pemberi delegasi kekuasaan yakni masyarakat luas harus memiliki fungsi kontrol, evaluasi kepada segelintir elite yakni mereka yang duduk di keparlemenan. Tidak lain hal tersebut bisa tercapai manakala tingkat melek pendidikan politik mereka haruslah pada level yang cukup baik. Pendidikan politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik.

Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Holdar and Zakharchenko dalam (Handoyo & Lestari, 2017) menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

## Kewarganegaraan Dan Peran Politiknya

Pendidikan politik dewasa ini bertujuan agar tercapainya tingkat partisipasi politik, meningkatnya kesadaran peran serta keikutsertaan dalam menjangkau pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Keberanian dalam menentukan diri secara otonom merupakan hal utama dalam pendidikan politik dalam rangka memperjuangkan politik di tengah-tengah diskursus konflik kepentingan-kepentingan politik. Maka aktivitas politik warga negara adalah dalam rangka memberikan pengaruh dalam rangka prosesi pengambilan dan keputusan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kesejahteraan umum. Dengan demikian pendidikan politik adalah dalam rangka mempersiapkan pribadi-pribadi masyarakat dalam perjuangan politik, guna mencapai penyelesaian politik yang paling menguntungkan bagi semua pihak, tanpa harus merugikan masyarakat luas dan banyak.

Sehingga, pendidikan politik dalam rangka untuk mengajak para warga negara subyek untuk ikut serta dalam berfikir, berdialog, aktif berbuat politik dengan variasi cara-cara yang memungkinkan untuk dicapai. Karena dengan cara-cara variasi akan lebih mudah untuk mencapai konsensus ketimbang terjerumus hanya kepada satu cara dalam pemecahan masalah politik. Lebih jelasnya bahwa pendidikan politik saat ini adalah berusaha dalam *reorientasi* dalam cara masyarakat

untuk merasa, berfikir, berkehendak, yang dikaitkan dengan aksi dan perbuatan politik aktif guna mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa pendidikan politik bukan hanya saja persoalan beropini, berfikir dan berpendapat, akan tetapi mengarah kepada *relasinya* dengan *aksi*. Oleh sebab itu bahwa *belajar politik* itu senantiasa berlangsung dalam kaitannya dengan *berbuat nyata*. Maka dalam hal tersebut pendidikan politik senantiasa memiliki unsur-unsur sebagai berikut ini. *Pertama*, pembentukan karakter melalui sikap, keyakinan, watak dan kepribadian setiap insan. *Kedua*, praxis, aksi, dan perbuatan menuju sebuah peningkatan perbaikan (*transendensi*) bagi struktur-struktur politik dan kemasyarakatan. *Ketiga*, demokratisasi dalam segala bidang sosial kemasyarakatan dan kehidupan. *Keempat*, kritik kemasyarakatan (*Social Criticism*), dan kritik-kritik terhadap kesalahan politik (*Politic fallacy*) yang dilakukan oleh para penguasa dan rezim partai politik. *Kelima*, dilanjutkan dengan upaya praxis dan nyata dalam mengatasi konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan interest dan kepentingan ideologi politik.

Sehingga tujuan khusus pendidikan politik melalui hal yang khas dan unik ini adalah guna melatih pribadi subjek guna melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik dan benar, dan pemupukan jiwa besar dalam hal kebajikan dan berbakti kepada sesama warga negara dan bangsa. Membentuk solidaritas, cita bangsa dan tanah air, bekerja kooperatif (kerjasama), jujur dan sportifitas, serta memupuk kebersamaan dan membangun toleransi. Maka akan terbangun pula dua unsur pokok dalam pendidikan politik yakni pembentukan hati nurani politik dan morlitas (*ethic*) pertanggung jawaban tindakan, perbuatan dan perilaku politik.

## Metode, Media, & Lembaga-Lembaga Pendidikan Politik

### Metode dan Media Pendidikan Politik

Metode pendidikan yang ditekankan untuk menunjang keberhasilan pendidikan politik bagi warga negara lebih ditekankan kepada metode pendidikan non formal. Metode ini berbeda dengan metode pendidikan formal dan informal. Metode pendidikan formal biasanya digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier di mana pemerintah bertindak sebagai penanggung jawabnya; sedangkan metode pendidikan informal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis. Pendidikan non formal adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sistematis dan diselenggarakan di luar sistem formal untuk memberikan pola-pola pembelajaran kepada anggota kelompok dalam suatu populasi (masyarakat) baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak.

Manfaat pendidikan ini baru dapat dirasakan melalui proses yang panjang dengan jalan penguatan pemahaman pada level personal melalui pemupukan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan untuk memahami sesuatu dari pengalaman sehari-hari, menghadiri pertemuan, mendengarkan radio, TV, media cetak, sosial media dan sebagainya. Melalui sumber-sumber tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai tentang politik dan pemerintahan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk sistem politik suatu negara.

Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Karena menekankan pada proses dan otonomi individual, model pendidikan politik (formal) dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup kepada warga negara untuk berekspresi dan mencurahkan pendapat. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik, antara lain. *Pertama*, bursa gagasan (*brainstorming*), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut. *Kedua*, buzz groups, di mana masing-masing partisipan beralih kepada rekan disamping kiri atau kanannya, dan kemudian melakukan diskusi singkat satu lawan satu. *Ketiga*, studi kusus, di mana partisipasi membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masalah yang pernah muncul di masa lalu dihadapi dan ditanggapi masyarakat. *Keempat*, debat. Dalam hal ini, partisipan mengambil posisi yang berbeda satu sama lain, bersikap sebagai oposisi atas suatu masalah dan mengajukan argumentasi yang berbeda dengan yang lainnya. *Kelima*, pengharapan, yaitu suatu metode di mana

partisipan menyatakan apa yang diharapkannya. *Keenam*, diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi (NurKhoiron, 1999).

Handoyo & Lestari, 2017 mengatakan media yang digunakan dalam pendidikan politik terdapat dua model, yaitu media langsung dan media tidak langsung. Media langsung. Dengan media ini, masyarakat terlibat secara langsung, kritis dan otonom dalam proses-proses pendidikan yang dilaksanakan. Media ini misalnya berbentuk seminar & diskusi, pelatihan, workshop, debat terbuka, yang semuanya diarahkan pada materi-materi pendidikan. Kelebihan media ini adalah, ia lebih efektif dan berhasil dalam mencapai sasaran atau tujuan pendidikan, karena media ini biasanya dilaksanakan untuk jumlah terbatas dan kelompok terbatas. Sedangkan kelemahannya adalah media ini tidak dapat mencapai tujuannya secara cepat dalam ukuran massal.

Media tidak langsung merupakan media dimana warganegara tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Media ini biasanya dipakai dalam proses pendidikan yang dilaksanakan secara massal dengan tujuan membangkitkan kesadaran warga negara atau memberi informasi penting kepada mereka tentang isi publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini tidak dimaksudkan untuk membangun kecakapan atau keahlian tertentu warga negara namun sebatas pada menggugah kesadaran atau memberikan informasi. Media ini digunakan misalnya untuk menyebarkan informasi secara massal misalnya membuat spanduk, selebaran, leaflet, newsletter, memasang iklan di media massa, menyebarkan informasi lewat internet, dan sebagainya.

### **Lembaga-Lembaga Potensial Dalam Pendidikan Politik di Indonesia**

*Pertama*, keluarga. Keluarga merupakan media primer pendidikan politik yang paling utama dan paling urgen selama masa kanak-kanak. Keluarga memegang peran paling fundamental dalam hal ini. Pengaruh yang paling nyata adalah bagaimana keluarga dapat membangun afiliasi dan loyalitas politik dasar anak-anaknya, membentuk rambu-rambu dasar kepribadian yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam menumbuhkan orientasi politik anak-anak dan mengembangkan kesadaran serta pemikiran politik mereka. Keluarga juga berperan membangun persepsi politik, seperti persepsi tentang kekuasaan, yang nantinya akan berperan dalam membentuk kesadaran politiknya sebagai warga negara. Bahkan pengalaman-pengalaman individu dalam berinteraksi dengan "kekuasaan" orang tuanya, secara parsial akan menentukan cara berinteraksinya dengan kekuasaan negara di kemudian hari. Dengan kata lain keluarga merupakan media internalisasi nilai-nilai dasar dan paling awal pada diri seseorang pada masa hidupnya.

*Kedua*, sekolah. Sekolah berpengaruh besar dalam pendidikan politik generasi muda, dengan berperan melalui pengajaran politik dan karakter melalui sistem sekolah. Pengajaran politik dilakukan melalui mata pelajaran tertentu seperti dalam pendidikan sosial & kewarganegaraan, kebangsaan serta sejarah. Di Rusia, kurikulum sejarah digunakan untuk melakukan doktrin politik atau pengajaran dan pengkokohan ideologi politik. Di Indonesia pada era Orde Baru, mata pelajaran PPKn diisi muatan P4 yang merupakan materi pendidikan politik utama dalam rangka membangun warga negara yang baik. Belakangan dengan di berlakukannya kurikulum 2013 (*Kurtilas*) maka sangat memungkinkan dalam setiap mata pelajaran disisipkan nilai-nilai moral kebangsaan dan kewarganegaraan kepada peserta didik.

Karakter sistem sekolah, yakni dengan suasana umum yang tercipta di sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk sensitifitas siswa terhadap dinamika kepribadian dan mengarahkan pandangan mereka terhadap bangun politik yang ada. Hal ini merupakan pengaruh dari: a). Kualitas pengajar. Manakala pengajar benar-benar menguasai materi pelajarannya dan dekat di hati siswa, yakin dengan ideologi yang dianut dan berkomitmen dalam perilakunya, ia akan lebih mudah memberi teladan dalam menanamkan ideologi tersebut. b). Hubungan guru dengan muridnya. Terkadang guru yang otoriter membuat siswa takut untuk memberi kritik atau berbeda pendapat dengannya, dan tentu iklim demokratis tidak dapat tercipta. Maka perlu dibangun sistem pembelajaran dua arah (*two way*) bersifat timbal balik (*resiprokal*) dalam membangun diskursus ilmu pengetahuan. c). Organisasi-organisasi sekolah, seperti ikatan, kelompok dan asosiasi pelajar.

Melalui organisasi sekolah siswa diajarkan dalam beraktualisasi diri, berpendapat, berfikir kritis dan bertindak. Sensitifitas siswa akan kemampuan diri dan afiliasi komunalnya tergantung kepada banyak tidaknya organisasi siswa dan tingkat kontribusi siswa didalamnya.

### **Pendidikan Politik Melalui Organisasi Politik**

Kantaprawira, 2006 mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya." Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasinya. Berdasarkan pendapat (Kantaprawira, 2006) tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan senantiasa berubah-ubah serta dinamis.

Politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Seyogyanya, ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, elite parpol dan partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah. Bahwa penting kiranya menempatkan pendidikan politik sebagai sarana agregasi kepentingan; yakni menyalurkan segala hasrat dan aspirasi serta pendapat masyarakat kepada pembuat dan pemegang kebijakan serta kekuasaan sebagai pihak yang berwenang, agar dalam hal ini segala tuntutan dan dukungan menjadi perhatian serta menjadi sebuah pertimbangan keputusan politik dan ini dikenal sebagai fungsi agregasi (*aggregative function*).

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan politik merupakan poin yang masuk dalam Anggaran Dasar (AD) pendirian sebuah partai politik. Lalu lebih lanjut dalam pasal 34 ayat (3a) UU No. 2 tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Dan berikutnya di pasal (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas bisa kita pahami bahwa Partai politik adalah pihak yang memiliki andil besar dalam proses pendidikan politik dan bagaimana seharusnya mengambil langkah agar dapat mngubah *image* miring yang selama ini melekat pada partai politik tersebut. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara di bumi tercinta Indonesia ini. Pengembangan Pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan generasi muda supaya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negeri ini.

Pada akhirnya, semua pihak harus turut serta di dalam pendidikan politik agar masyarakat mau dan peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Apabila tidak dimulai dari sekarang, hal ini dapat menyebabkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Masyarakat terlebih kaum muda sebagai generasi penerus harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan Indonesia dimasa yang akan datang.

Pendidikan politik harus berkembang dalam ranah kebebasan dan bertanggung jawab di tengah masyarakat sebagai sebuah gerakan pencerdasan penuh humanisasi. Jika saja pendidikan politik dapat terbangun dan terlembaga dalam segala aspek struktur kemasyarakatan tertentu. Misalnya

dalam organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, serikat pekerja dan buruh, angkatan bersenjata, Aparatur Sipil Negara, dunia akademis, dan lain sebagainya, maka prasyarat untuk pengadaan lembaga-lembaga pendidikan politik ini adalah *otonomi/kemandirian*.

Jika saja kemandirian dan otonomi dari pendidikan politik yang terbangun tidak dijamin secara cukup, maka lembaga-lembaga tersebut condong jadi berbahaya, bisa dijadikan sebagai ruang dalam alat indoktrinasi ide dan gagasan para pemain kepentingan dan pihak-pihak yang berkuasa guna menggiring massa rakyat, tanpa rasa keinginan untuk meredam persoalan yang berkembang, dan melumpuhkan aktivitas serta kreatifitas rakyat itu sendiri. Atau dijadikan sebuah miniatur struktur kenegaraan yang tidak demokratis. Kemudian tumbuh dan berkembangnya dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi kepentingan, mengeksploitasi kepentingan penguasa dan kepentingan golongan.

Oleh karena itu, pendidikan politik harus berani untuk mengajarkan bagaimana cara mendobrak atas kepincangan dalam masyarakat itu sendiri serta berbagai pengaruh buruk skema ketidakadilan yang terbentuk oleh sistem yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Untuk lebih mengarah kepada pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju demokrasi yang terdistribusi secara baik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Kaitannya dengan proses pendidikan politik partai bisa melakukan melalui sarana sosialisasi politik dimana pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik bisa melalui partai politik, sekolah dan pemerintah (Surbakti, 2010). Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialogis antara masyarakat dan partai politik dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang ideal dan baik. masyarakat bisa diajak melalui proses pengenalan politik dalam pelatihan, kegiatan kursus kepemimpinan, diskusi, kegiatan seminar, sosialisasi peraturan daerah, dan regulasi pemerintah, dan berbagai forum ilmiah maka dalam hal ini partai politik dalam sistem demokrasi dapat melakukan fungsinya dalam hal pendidikan politik.

Disamping itu semua yang terpenting dari pelembaaan sebuah pendidikan politik adalah menunjukkan adanya peluang dan kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik, negara dan kemasyarakatan secara lebih aktual, efisien, dan memenuhi kebutuhan harapan yang dicita-citakan masyarakat yang berkeadilan. Dengan kata lain lembaga partai politik juga harus bisa mengarahkan inovasi kelembagaan dan melalui pendidikan politik bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat berbangsa dan bernegara.

Bagi partai politik hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat pemilih menjadikan partai sebagai mesin politik yang dinamis menyapa dalam ruang dialog publik menjadikan diskursus yang populer ditengah masyarakat sebagai bahan kajian dalam rangka pendekatan tersebut. Tentu dialog yang dibangun haruslah memberikan pendidikan politik yang terukur, juga untuk menghindari praktik-praktik politik transaksional dan pragmatis ditengah masyarakat. Masyarakat tidak bisa lagi diiming-imingi oleh janji-janji *utopis* tanpa realisasi. Justru warga masyarakat diajak untuk berfikir bagaimana seharusnya mengawal proses pemilu dan pembangunan dengan turut aktif mengakomodasi suara dan peningkatan kontrol, mencoba mengenal para calon kandidat baik di Pileg maupun Pilpres.

Sebagai pemilih pemula contohnya kaum muda mereka lebih cenderung terdidik dibandingkan golongan sebelumnya, mereka memiliki tingkat produktifitas tinggi dan juga sangat potensial partisipasinya di proses Pemilu. Kemas pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan kepercayaan terhadap proses pemilu dari masyarakat terutama kaum milenial ini.

### **Peran Pemerintah melalui KPU Dalam Pendidikan Politik**

Peran pemerintah dan pemerintah daerah termaktub dalam UU No. 7 tahun 2007 tentang PEMILU Bab XV Pasal 434 ayat 2 butir (D) dalam mendukung pemilu yakni berupa ; pelaksanaan



pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum. Disisi lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh KPU Pusat, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup kabupaten/kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dimasing-masing tingkat daerah, kota maupun provinsi serta pusat.

Upaya tersebut merupakan bagian dari amanat Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi ini tidak serta merta dalam rapat terbuka, dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam satu ruangan. Tentu sekarang sudah era digital dimana era yang sudah sangat mobile. Tentunya bagaimana informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Salah satu terobosan yang dilakukan Kemendagri ini misalnya, menyusun cerita dalam bentuk komik. Komik itu akan memuat konten terkait pentingnya penggunaan hak suara pemilih pemula bagi nasib Indonesia ke depan.

Penyusunan komik ini melibatkan sejumlah pihak guna memastikan pesan-pesan yang ada dikemas dengan menarik dan mudah dicerna oleh anak-anak muda misalnya sebagai pemilih pemula. Tidak terlalu banyak memuat cerita soal pasal-pasal teknis dalam UU Pemilu. Contohnya, soal gunakan hak suara pada saat pengumungutan suara. Itu sudah merupakan pesan tersirat penegasan bagaimana mendorong masyarakat bisa datang ke TPS nanti di saat waktu pemilu tiba. Selain itu memang sebagian besar pemilih pemula dinilai tak mengetahui secara rinci 20 partai politik peserta Pemilu 2019. Sehingga materi-materi kreatif melalui berbagai jenis media perlu dikembangkan guna memancing antusiasme pemilih pemula sebagai masyarakat pemilih.

Pemilih pemula sebagai segmentasi pemilih awal merupakan segmentasi potensial dari komposisi jumlah masyarakat yang ada. Langkah seperti ini, dinilai bisa memenuhi target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian apa yang ditargetkan kiranya dengan berbagai upaya pemerintah tentunya adalah langkah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat (Rachman, 2019).

Bisa juga dilakukan melalui Bimbingan teknis kepada pegawai pelaksana KPU. Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU tersebut merupakan upaya yang sangat bagus karena dapat meningkatkan profesionalisme kerja penyelenggara pemilukada yang bertugas untuk melakukan sosialisasi. Selain itu upaya tersebut juga menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tingkatkan partisipasi melalui pendidikan politik yang terstruktur dan terprogram. Hal ini bukan saja pekerjaan rumah bagi Partai Politik namun juga kerja berat bagi KPU sebagai Penyelenggara utama Pemilihan umum di negeri ini. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut yakni Partai dan KPU. Bagaimanapun juga ketika berbicara angka partisipasi maka konsep ini akan senantiasa berhubungan dengan proses mana komunikasi dalam sosialisasi disampaikan. Dan merupakan bagian yang integral atau bisa dikatakan sebagai variabel-variabel yang dependen. Dimana sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik dari Partai Politik terhadap pemilihnya dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Maka amat koheren jika kita melihat peran dua kelembagaan tersebut sebagai institusi yang paling potensial dalam Pemilu. Antar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Partai Politik sebagai aktor Pemilu dan Masyarakat sebagai pendelegasi suara harus saling membangun kepercayaan (*trust*).

Demikian juga KPU sebagaimana kerja partai dalam mendekati kepada masyarakat, lembaga ini memiliki peran dominan melakukan edukasi kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini sebagai contoh kecil bagaimana mendekati diri kepada pemilih pemula ada baiknya KPU menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan Sekolah ditingkat SMU, dan Perguruan tinggi mengadakan semacam *Roadshow* pengenalan pemilu kepada pemilih pemula di usia 17-24 tahun, dimasa aktif sekolah dan universitas.

Bahwa dalam sosialisasi tersebut kiranya disampaikan bagaimana pentingnya membangun kesadaran dalam proses partisipasi politik. Tujuannya bukan kepada hanya sekedar memberikan suara di pemilu. Namun jauh daripada itu upaya penyadaran atas keikutsertaan mereka sangat menentukan proses pembangunan dan jalannya kebijakan pemerintahan. Bahkan kalo kita mau jauh menilik peran pemuda sangat koheren dalam proses pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Maka perannya cukup sentral dalam dinamisasi kehidupan sosial dan politik bernegara.

Mengingat ada kebijakan moratorium mengenai iklan politik yang pernah dilakukan di Pemilu sebelumnya maka untuk mengatasi kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu yang tidak kalah pentingnya. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Penilaian sistem pemilu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses pemilihan kepala daerah, tata cara pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, dan munculnya masalah-masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas (Mujtahid, 2013).

Berkaitan dengan Negara-negara baru (Huntington & Nelson, 1994) dalam *No easy choice: political participation in developing countries* memberi tafsir yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, lagal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 2008).

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan

bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya di perhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*) atas tindakan perbuatan mereka dalam proses politik (Budiarjo, 2008).

Menjadi momentum dan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat. Pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon yang terpilih pada proses Pemilu. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang muncul seperti; money politik, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu, yang seharusnya tidak dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suara mereka sebagai pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

### **Media Infomasi dan Komunikasi Publik**

Media informasi yang dimaksud adalah radio, televisi, pers, bioskop, teater, buku, mimbar masjid, lembaga ilmiah, gelanggang budaya, lembaga pendidikan, asosiasi-asosiasi moral dan sebagainya. Media informasi ini melakukan fungsi politiknya pada masyarakat dalam bentuk berikut *Pertama*, Kontrol sosial, berupa pemaparan berita dan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan meletakkannya sebagai fokus perhatian. Ini merupakan fungsi politis, karena inilah yang menentukan mana peristiwa yang tidak harus dipublikasikan dan mana yang dibiarkan saja untuk dikonsumsi. *Kedua*, interpretasi berbagai peristiwa, menempatkannya pada konteks umum dan menganalisis dampaknya. Ini berpengaruh terhadap pengarahannya perilaku politik sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. *Ketiga*, sosialisasi politik. Maksudnya adalah proses membentuk, mengokohkan atau mengubah kultur politik. Media informasi dapat dikategorikan sebagai agen-agen internasional pendidikan politik melalui berbagai fakta, nilai, contoh-perilaku dan pengetahuan tentang karakter dunia politik yang disajikannya.

### **Pendidikan Politik Melalui Bahasa Edukatif Untuk Menumbuhkan Kesadaran Insan Politik**

Berkaitan dengan ciri budaya politik kaula (*subject political culture*) yang dominan pada masyarakat kita di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap sistem sebagai sebuah keseluruhan, terutama juga output dari sistem tersebut sebagaimana mereka semua merasakan dan menjalani hasilnya. Namun perhatian mereka terhadap aspek input sebagai aktor yang mempengaruhi hasil output dalam sebuah sistem politik tersebut masih sangat minim. Untuk itu kiranya mengupayakan sebuah pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dapat dinyatakan sebagaimana berikut ini (Kartono & Kartini, 2009):

*Pertama*, pendidikan politik adalah *upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial*, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Kebijakan tersebut berupa pengembangan sportivitas, tingkah laku jujur, toleransi dengan sesama anak bangsa, bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur dan sikap-sikap yang menguntungkan lainnya. Sikap tersebut merupakan syarat teknis sebuah tingkah laku politik demi mencapai tujuan kebaikan, kerukunan, dan kebersamaan dalam pembangunan bangsa.

*Kedua*, pendidikan politik identik dengan *pembentukan hati nurani politik*, yang didalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab ethis terhadap sesama warga. Dalam demokrasi, rakyat senantiasa diberikan kebebasan dan kesempatan untuk memilih segala alternatif yang menurut pribadinya baik dan menimbulkan keuntungan bagi dirinya dalam memenuhi segala aspek kehidupannya. Oleh karenanya itu dia diajar untuk dapat mempertanggungjawabkan segala pilihannya tersebut, dengan sikap penuh kejujuran dan berani. Serta menghadapi segala bentuk resiko, kejadian-kejadian yang senantiasa berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan

bernegaranya. Mereka tidak boleh *apatis, pasif, sinis* dan *naif* secara politik, dan hanya mampu membayangkan sebuah demokrasi yang ideal belaka.

Melalui pendidikan politik masyarakat diharapkan bisa menjadi insan yang *kreatif, kritis, mandiri, otonom, mantap* dan *partisipatif* bila kepadanya dihadapkan kepada hal-hal dan kesempatan untuk berperilaku secara demokratis dalam sebuah sistem demokrasi.

*Ketiga*, pendidikan politik menumbuhkan *skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik (Political Insight)* mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. *Skeptisisme* harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif tidak kritis; yaitu mudah dan gampang percaya dan meyakini "kebenaran" mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang bersifat melenakan daya kognitif (pengenalan dan nalar akal sehat). Dengan begitu setiap orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, pengecekan, verifikasi terhadap realitas politik yang tengah berlangsung.

Oleh karena itu pribadi yang memiliki dasarpendidikan politik yang kuat akan selalu berkepentingan dengan ketidaktetapan (dinamisme) dan perubahan struktur-struktur serta urusan-urusan lokal, regional dan nasional serta cenderung mengadakan perbaikan dan kemajuan/progres dan aktifitas menyempurnakan kelembagaan politik.

*Keempat*, pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan *perbaikan dan peningkatan* terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan. Politik dalam negara bukan saja mencakup formula teoritis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik tajam.

Maka penting adalah bukan hanya sebatas menetapkan formula-formula formalitas resmi dan preskripsi yuridis semata, akan tetapi jauh lebih penting dalam sebuah demokratisasi dalam prosesnya yang tersirat dalam sila keempat Pancasila apakah sudah benar-benar diterapkan dengan benar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian apakah penerapannya sudah lurus dan benar. Bagaimanakah kenyataan yang sebenarnya fakta itu dan seharusnya dilakukan dengan cara yang benar, bukan fakta yang berlangsung menurut satu dan sebuah konsep politik semata saja.

*Kelima*, pendidikan politik banyak membahas *konflik-konflik aktual*. Dan lewat pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara-cara yang ditekankan dari atas. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintahan. Juga ikut mengontrol gerak pembangunan, tanpa perlu terjadi konflik-konflik yang membahayakan serta menajdikan perbedaan dalam sebuah praktik politik menjadi perhatian utama (*main diskursus*) yang justru kontraproduktif dalam pembangunan bangsa dalam sebuah kemajemukan dan persatuan.

### **Landasan Hukum Pendidikan Politik**

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut: Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari: landasan ideologis, yaitu Pancasila, landasan konstitusi, yaitu UUD 1945, dan landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama kaum muda harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 1945.

### Tujuan Pendidikan Politik Dalam Peran Politik Insani & Kewarganegaraannya

Jiwa dari pendidikan politik adalah "*Politische Engagement*" (ikatan-perjanjian politik), yaitu keikutsertaannya dalam peristiwa-peristiwa politik, dan peranan turut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Hal ini merupakan tujuan pendidikan politik yang pada hakekatnya adalah mengikutsertakan rakyat dan warga negara dalam sebuah sistem politiknya. Bahwa rakyat/warga negara citizenship berperan serta secara aktif mengimbangi kekuatan dan kekuasaan dalam negara. Dengan kata lain rakyat bukanlah warganegara seperti bebek yang mengambang di atas air tanpa inisiatif dan dinamika dan juga bukan mesin reaksi yang pasif dalam sebuah sistem politik yang turut-manut pada ketentuan-ketentuan regulasi pemerintah tanpa berperan serta mengontrol, mengawasi, mengevaluasi diluar dukungan terhadap kebijakan yang memang sudah pro kepada mereka.

Sehingga pendidikan politik merupakan gerak emansipatoris warga negara dalam membentuk sebuah wawasan politik (*Political Insight*). Sehingga warga negara dalam partisipasinya bukan hanya saja terbatas pada seremonial-seremonial pemberian suara namun jauh daripada itu dalam bentuk kesadaran yang benar-benar "hakiki" lahir atas pengetahuan, tidak sekedar partisipasi dengan keberpihakan yang buta, mereka pada posisi yang netral tidak berpihak semata-mata atas kepentingan. Namun menyadari dirinya adalah merupakan bagian dari masyarakat luas yang majemuk yang harus menjadi subjek utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Gerakan emansipatoris inilah yang melepaskan dari kebelengguan seorang individu atas keterpengaruhan pihak lain, paksaan, bahkan kebebasan dalam mengutarakan pemahaman diri. Seseorang dalam sebuah masyarakat menjadi sadar tidak ingin mengalami kemandegan dalam sebuah perjuangan politiknya dalam merubah nasib ke arah yang lebih baik dalam sebuah sistem politik pemerintahannya.

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

### Ranah Kognitif, Afektif & Psikomotorik Pendidikan Politik

*Pertama*, Ranah Kognitif. Salah satu aspek yang menjadi tujuan pendidikan politik adalah aspek kognitif yang arahnya adalah membangun pengetahuan politik warga negara (*civic knowledge*). Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan. Diantaranya pengetahuan mengenai *demokrasi*, kewarganegaraan (*citizenship*), *kedaulatan rakyat dan negara*, *lembaga negara*, *hubungan pusat dan daerah*, dan *sistem ekonomi*.

*Kedua*, ranah Afektif. Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara. Nilai-nilai itu disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter dan keberpihakan warganegara sebagai implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik kapasitasnya sebagai individu yang bebas otonom maupun sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan politik adalah nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kebebasan, nilai tanggung jawab, kemandirian (mewujudkan diri sendiri), hak untuk menentukan diri sendiri, partisipasi (turut menentukan), toleransi, pertolongan agar bisa menolong diri sendiri, pluralisme, kemajuan serta perdamaian.

*Ketiga*, Ranah Psikomotorik. Unsur dasar kedua pendidikan politik bagi warga negara di dalam masyarakat yang demokratis adalah kecakapan-kecakapan warga negara. Jika warga negara menguji hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota komunitas mandiri, mereka tidak hanya memerlukan penguasaan terhadap bangunan pengetahuan sebagaimana telah digagas

dalam lima gugus permasalahan, tetapi juga membutuhkan penguasaan terhadap kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipasi yang terkait. Kecakapan intelektual yang dimaksud adalah kecakapan berpikir kritis.

Kecakapan intelektual warga negara dalam melihat berbagai persoalan politis dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dalam materi pendidikan politik. Kemampuan warga negara untuk memikirkan isu politik secara kritis, misalnya mewajibkan seseorang memahami isu tersebut sekaligus sejarahnya, keterkaitan dengan masa kini, serta merangkai menjadi piranti intelektual untuk membuat berbagai pertimbangan yang akan bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Oleh karenanya, kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi warga negara yang bertanggung jawab dan terdidik (sadar informasi) sering disebut sebagai kecakapan berpikir kritis.

Prasyarat penting pendidikan politik warga negara dalam konteks membangun kecakapan berpikir kritis adalah perlunya dibangun kesadaran kritis di kalangan warga negara. Kesadaran dianggap penting karena tidak mungkin membangun kecakapan berpikir kritis tanpa terlebih dahulu dibangun kesadaran kritis. Kesadaran kritis akan membawa warga negara kepada cara pandang yang lebih luas tentang suatu persoalan, sehingga suatu persoalan bisa diidentifikasi dan dianalisis secara tepat. Cara membangkitkan dan membangun kesadaran kritis warga negara ialah dengan melewati tangga-tangga sebagai berikut. Tangga 1: membangun keterlibatan masyarakat bawah dalam proses politik, tangga 2: observasi sistematis, yaitu mengajak masyarakat mengidentifikasi akar penyebab represi (ketertindasan mereka), tangga 3: analisis struktural, yaitu menjelaskan keterkaitan antara berbagai sistem, misalnya sistem kapitalisme yang berdampak pada kemiskinan, tangga 4: menentukan tujuan, yaitu menyediakan perspektif secara lengkap yang terkait dengan struktur dan situasi lokal atau nasional, tangga 5: menentukan strategi dan taktik, yakni membuat rencana dan implementasi dari aksi yang telah disiapkan, dan tangga 6: aksi dan refleksi secara terus menerus, dimana refleksi tanpa aksi adalah hanyalah omong kosong belaka, namun aksi tanpa refleksi adalah aktivisme murni. Dengan tangga-tangga bangunan kesadaran kritis, persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat akan dapat dipahami dari aspek-aspek yang mendasar.

#### 4. KESIMPULAN

Pendidikan politik dalam tulisan ini dapat dipahami juga sebagai proses berkesinambungan dalam memberikan pengetahuan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima informasi pengetahuan politik dalam proses yang berkesinambungan. Sehingga masyarakat dalam hal ini sebagai penerima pengetahuan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik sebagai sebuah pendidikan orang dewasa (andragogi) menekankan aspek kesadaran. Dengan mendapatkan pendidikan politik menyadarkan pada kekuatan intelektual seseorang untuk ikut serta menguasai kondisi sosial dan politik, bahkan juga memberikan pengaruhnya. Lebih lanjut pendidikan politik sebagai bagian hak asasi manusia terdapat dimensi keterbukaan untuk masa datang yang lebih baik. Dan membentuk diri seseorang manusia di masa mendatang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan asumsi bahwa tiap diri seseorang akan mampu memberikan bentuk-bentuk baru pada segala potensi yang dimiliki oleh dirinya dan pada lingkungan sekitarnya.

Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga aspek penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberikan penyadaran melalui pengetahuan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogis yang dilakukan dengan suka rela antara penyampai informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk masyarakat setelah menerima informasi berupa pengetahuan, pelatihan dan ajaran dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (*kognisi*), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (*afeksi*) dan mewujudkan kecakapan (*psikomotorik*) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam kehidupan bersama di sebuah bangsa dan negara.

## REFERENSI

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Huntington, S. P. (n.d.). *Tertib Politik: Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo.
- Kartono, & Kartini. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mujtahid, I. M. (2013). Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. In *Seminar Nasional Fisip-UT 2013*.
- NurKhoiron, M. N. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta: LKIS.
- Rachman, D. A. an. (2019). Cara Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu”, Penulis : Dylan Aprialdo Rachman.
- Samah, K., & S, R. F. (2014). *Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan dalam Pilpres*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Surbakti, R. (2010). *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

